

ANALISIS PRAKTIK MANAJEMEN LABA SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERLAKUAN UU NO. 36 TAHUN 2008
OLEH: YUSTINA, RAHARDJO dan IRAWAN

ANALISIS PRAKTIK MANAJEMEN LABA SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERLAKUAN UU NO. 36 TAHUN 2008

Yustina
Hartono Rahardjo *
Ronny Irawan

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

* hartono-r@ukwms.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 2, 2012

Revised November 13, 2013

Accepted December 8, 2013

Key words:

Manajemen Laba, Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Discretionary Accrual, Kewajiban Pajak Tangguhan, Tingkat Hutang

ABSTRACT

A change in corporate income tax rates in 2008 were effected from January 1, 2009 will lead to an indication of earnings management by the company to obtain tax savings. Therefore, this study aimed to analyze whether the company's conduct earnings management in response to changes in corporate income tax rates. In addition, this study also analyze factors that affecting earnings management by companies. Variable's research that used in this study are discretionary accrual (DA), net of deferred tax liabilities (NDTL), debt level (DEBT), firm size (SIZE), and managerial ownership (MGTOWN). The research design is quantitative. The object of research is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange with the study period of one year before and two years after the change of income tax rate that is year 2008-2010. Source data obtained from financial statements published by the Indonesia Stock Exchange and the Indonesian Capital Market Directory. Techniques of data analysis was performed with two sample t-test and multiple linear regression analysis. The test results showed that the company does not undertake earnings management in response to changes income tax rate for obtain the tax savings. The test results also show that earnings management is done by the company is affected by NDTL. NDTL significant positive impact to earnings management while DEBT, SIZE, and MGTOWN no significant effect to earnings management.

ABSTRAK

Adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2008 yang diefektifkan mulai 1 Januari 2009 menimbulkan indikasi akan dilakukannya manajemen laba oleh perusahaan untuk memperoleh penghematan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perusahaan melakukan manajemen laba dalam menanggapi perubahan tarif pajak penghasilan badan. Selain itu, dalam penelitian ini juga menguji faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Variabel penelitian yang digunakan adalah discretionary accrual (DA), kewajiban pajak tangguhan bersih (NDTL), tingkat hutang (DEBT), ukuran perusahaan (SIZE), dan kepemilikan manajerial (MGTOWN). Desain penelitian adalah kuantitatif dan perusahaan yang dijadikan obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian satu tahun sebelum dan dua tahun sesudah perubahan tarif pajak penghasilan badan yaitu tahun 2008-2010. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia dan Indonesian Capital Market Directory. Teknik analisis data menggunakan uji two sample t-test dan uji regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen laba dalam menanggapi perubahan tarif pajak penghasilan badan untuk memperoleh penghematan pajak. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan hanya dipengaruhi oleh NDTL. NDTL berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba sedangkan DEBT, SIZE, dan MGTOWN tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari arti pajak itu sendiri dapat dijelaskan bahwa pajak bersifat memaksa yang bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita. Pajak pun mempunyai fungsinya sendiri yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*), pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi mengatur (*regular*) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah pajak penghasilan yang salah satunya berasal dari pajak penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Perpajakan bisa menimbulkan konflik antara manajemen perusahaan dengan pemerintah karena adanya perbedaan kepentingan. Contoh kasus permasalahan pajak penghasilan yang sering terjadi yaitu pembuatan laporan keuangan ganda guna menghindari atau memperkecil besarnya nilai pajak yang harus dibayar. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya perusahaan pasti ingin membayar pajak dalam jumlah sekecil mungkin sedangkan pemerintah berkeinginan memungut pajak setinggi mungkin karena pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah. Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Badan tergantung dari laba yang dihasilkan perusahaan setiap tahunnya. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar, sebaliknya semakin kecil laba perusahaan maka semakin kecil jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan pada suatu periode yang meringkas transaksi-transaksi yang terjadi selama satu periode. Laporan keuangan disusun berdasarkan dasar akrual bukan dasar kas. Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan sendiri merupakan salah satu media utama yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar. Tujuan laporan keuangan adalah memberi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan diharapkan disajikan secara layak, jelas, dan lengkap yang mengungkapkan kenyataan-kenyataan ekonomi mengenai eksistensi dan operasi perusahaan sesuai keadaan sebenarnya.

Laba yang dihasilkan perusahaan setiap tahunnya dapat dilihat dalam laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Laba menurut akuntansi tentu berbeda dengan laba menurut perpajakan, laba menurut pajak adalah penghasilan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dibebankan menurut aturan perpajakan. Laba ini yang nantinya akan menjadi dasar perhitungan besar pajak penghasilan yang akan dibayar. Laba menurut akuntansi adalah selisih lebih pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, laba biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Laba sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan oleh berbagai pihak berkepentingan seperti bonus yang akan diberikan kepada karyawan, dan keputusan investasi. Pentingnya peran laba bagi pengguna laporan keuangan serta besarnya beban pajak yang harus dibayarkan dirasa terlalu berat bagi perusahaan dapat mendorong pihak manajemen perusahaan melakukan segala cara salah satunya manajemen laba dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan riil agar kinerjanya dianggap lebih baik atau untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan (Hidayati dan Zulaikha, 2003). Berbagai penelitian telah dilakukan dengan menggunakan bermacam-macam pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba (Wiryandari dan Yulianti, 2009).

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen yang berupa campur tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraannya secara personel maupun meningkatkan nilai perusahaan (Widyaningdyah, 2001). Manajemen laba pada laporan keuangan dilakukan oleh manajer dengan menggunakan *discretionary accrual*. *Discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan

manajemen. Manajemen laba dilakukan agar laba perusahaan tampak sebagaimana yang diharapkan bagi pengguna laporan keuangan. Tujuan dari manajemen melakukan manajemen laba adalah untuk memperoleh bonus dan kompensasi, untuk mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal, untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang, dan untuk menghindari biaya politik (Wulandari, dkk, 2004).

Manajemen dapat menunda pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun sebelum penurunan tarif pajak untuk meminimalkan pajak. Secara akuntansi hal ini dapat diterima karena menurut standar akuntansi keuangan entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Prinsip dasar akrual yaitu pengakuan beban dan pendapatan pada periode dimana seharusnya terjadi atau yang dikenal dengan istilah *matching concept* (membandingkan beban dengan pendapatan pada periode yang sama). Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Konsep basis akrual inilah yang memberikan kebebasan bagi manajemen melakukan manajemen laba.

Berubahnya tarif pajak penghasilan badan menjadi tarif tunggal sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yang menguntungkan bagi perusahaan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya. Tujuan dilakukannya reformasi pajak (*tax reform*) ini untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih menegakkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam (Suandy, 2008). Perubahan tarif ini dapat menjadi peluang dan mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan *discretionary accrual*. Hal ini didukung dengan adanya banyak motivasi dalam melakukan manajemen laba, salah satunya yaitu *taxation motivation*. *Taxation motivation* yaitu perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menghasilkan laba yang dilaporkan lebih rendah dari seharusnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah menjadi lebih rendah (Scoot, 2000 dalam Djamaluddin, 2007). *Tax shifting* adalah upaya manajemen dalam menanggapi perubahan tarif pajak badan yaitu dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan tarif pajak ke laba sesudah perubahan tarif pajak.

Pada tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak Indonesia menerbitkan kembali Undang-Undang yang merevisi Pajak Penghasilan, yaitu UU No. 36 Tahun 2008. Dimana dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 terjadi perubahan tarif pajak penghasilan badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal yaitu: 28% (tahun 2009), 25% (tahun 2010), dan 5% lebih rendah untuk perusahaan yang *go public* dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Tarif pajak penghasilan badan ini mulai diefektifkan 1 January 2009, adanya pemberian insentif dengan penurunan tarif pajak ini membuat jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan lebih rendah. Hal ini tentunya menguntungkan bagi perusahaan karena dengan jumlah pajak yang dibayarkan lebih rendah berarti tarif pajak efektifnya akan semakin kecil. Tarif pajak efektif adalah tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan Wajib Pajak.

Insentif yang didapatkan biasanya berupa insentif pajak dan insentif non-pajak. Insentif sendiri merupakan perangsang yang diberikan untuk menjaga atau meningkatkan kinerja dari standar-standar yang telah ditetapkan. Insentif pajak berarti suatu perangsang atau keringan pembayaran pajak yang ditawarkan kepada wajib pajak seperti *tax holiday*, dan penurunan tarif pajak. Tujuan dari insentif pajak salah satunya adalah dapat meningkatkan tingkat investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk sektor-sektor dan daerah-daerah tertentu. Insentif pajak dalam penelitian ini diukur dengan kewajiban pajak tangguhan bersih. Kewajiban pajak tangguhan bersih dipilih karena dianggap dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian (Yulianti, 2005). Kewajiban pajak tangguhan bersih yaitu kewajiban pajak tangguhan dikurangi aktiva pajak tangguhan bersih.

Insentif non-pajak adalah insentif yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri guna meningkatkan produktifitas karyawan dan mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam perusahaan. Insentif non-pajak dapat diukur dengan tingkat hutang, ukuran perusahaan, dan

kepemilikan manajerial (Guenther, 1994). Variabel pengukur insentif non-pajak dipilih berdasarkan 3 hal yang melatarbelakangi manajemen laba yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt covenant hypothesis*, dan *political cost hypothesis*. Tingkat hutang adalah besar kecilnya kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa di waktu yang akan datang. Dalam Guenther (1994), Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran bunga atas hutang. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Jumlah karyawan, total asset, jumlah penjualan merupakan ukuran yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan. Dalam Guenther (1994), Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan melakukan lebih banyak kebijakan yang akan menyebabkan laba menurun dengan maksud mengurangi efek politis. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer. Kepemilikan manajerial diharapkan akan memperkecil kemungkinan praktik manajemen laba yang akan dilakukan oleh manajer sehingga manajer akan mengambil tindakan yang tidak untuk kepentingannya sendiri melainkan untuk perusahaan karena manajer juga akan merasakan dampak atas keputusan yang diambil.

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai manajemen laba dan reformasi pajak. Guenther (1994), dan Yamashita dan Otogawa (2007) merupakan penelitian yang dilakukan di luar negeri. Di Indonesia terdapat beberapa penelitian sejenis yaitu Hidayati dan Zulaikha (2003), Alim (2009), Subagyo dan Oktavia (2010), Wijaya dan Martani (2011), dan Fitriyani, dkk (2012). Penelitian Guenther (1994) di Amerika dan Yamashita dan Otogawa (2007) di Jepang berhasil membuktikan bahwa *discretionary accruals* negatif pada perusahaan sebelum diberlakukannya tarif pajak dan adanya pengurangan *discretionary accrual* selama periode sebelum diberlakukan tarif baru yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan adanya manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan menunda *earnings* pada periode sebelum diefektifkannya pengurangan tarif untuk meminimalkan pajak. Penelitian yang dilakukan di Indonesia, Hidayati dan Zulaikha (2003) membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara *discretionary accrual* tahun 2000 dan 2001 yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan tidak merespon adanya perubahan Undang-Undang dengan melakukan manajemen laba untuk tujuan meminimumkan beban pajak. Penelitian yang dilakukan Alim (2009) menemukan bukti adanya indikasi terjadinya *income decreasing* manajemen laba melalui *discretionary accrual* dalam periode satu tahun sebelum diberlakukannya perubahan tarif yang baru. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bukti tidak ada pengaruh besarnya ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dan adanya hubungan negatif antara besarnya tingkat utang dengan manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Subagyo dan Octavia (2010) membuktikan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) saja, yang memanipulasi labanya dan dipengaruhi oleh insentif pajak dan insentif non pajak, sedangkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) hanya dipengaruhi oleh insentif non pajak saja. Penelitian Wijaya dan Martani (2011) membuktikan bahwa baik perusahaan yang memperoleh laba dan mengalami kerugian melakukan manajemen laba dan manajemen laba yang dilakukan dipengaruhi oleh insentif pajak dan non pajak baik untuk *profit firm* dan *loss firm*. Hasil penelitian Fitriyani, dkk (2012) menunjukkan bahwa *discretionary accrual* sesudah pemberlakuan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pemberlakuan UU. Hal ini menunjukkan adanya manajemen laba yang ditunjukkan dengan perbedaan *discretionary accrual* pada sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 36 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil yang berbeda-beda yang didapat atas penelitian yang dilakukan atas praktik manajemen laba terhadap pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan maka penelitian ini mengambil topik sejenis. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel karena perusahaan manufaktur memiliki jumlah terbanyak yang terdaftar di BEI, perusahaan manufaktur memiliki struktur industri yang lebih kompleks (dapat dilihat dalam perhitungan HPP dan siklus yang dimiliki seperti siklus penjualan, produksi, dan siklus pembelian), dan pada perusahaan manufaktur memiliki umur perusahaan yang lebih panjang. Selain itu, terdapat pula beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini periode penelitian yang digunakan yaitu satu tahun sebelum dan dua tahun sesudah diefektifkannya perubahan tarif pajak penghasilan badan. Periode penelitian yang ditetapkan satu tahun sebelum perubahan tarif pajak sesuai UU No. 36 tahun 2008 dan dua tahun sesudah perubahan tarif pajak un-

tuk mengetahui apakah perusahaan akan melakukan manajemen laba karena adanya perubahan menjadi 28% pada tahun 2009 dan 25% tahun 2010 untuk mendapatkan keuntungan pajak. Kewajiban pajak tangguhan bersih digunakan sebagai insentif pajak karena dianggap dapat mendeteksi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk menghindari kerugian. Dalam penelitian ini insentif non-pajak akan diukur dengan tingkat hutang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah perusahaan melakukan praktik manajemen laba sebagai tanggapan atas perubahan tarif pajak penghasilan badan?; (2) Apakah kewajiban pajak tangguhan bersih mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan?; (3) Apakah tingkat hutang mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan?; (4) Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan?; dan (5) Apakah kepemilikan manajerial mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan? Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan praktik manajemen laba sebagai tanggapan atas perubahan tarif pajak penghasilan badan dan (2) Untuk mengetahui apakah kewajiban pajak tangguhan bersih, tingkat hutang, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial mempengaruhi perusahaan dalam melakukan manajemen laba.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Literatur

Laba

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai laba, alangkah baiknya mengerti definisi akan laba. Laba merupakan selisih lebih pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, laba biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Tujuan utama perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, oleh karena itu banyak yang menilai keberhasilan suatu perusahaan dengan melihat tingkat laba yang diperoleh. Ada beberapa definisi laba seperti menurut Paton dan Littleton dalam Suwardjono (2010), laba adalah kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusikan kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham (dalam bentuk bunga, pajak, dan dividen) tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham semula. Menurut statement FASB dalam Harahap (2007) laba adalah naiknya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entitas dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laba merupakan kenaikan aset atau naiknya nilai ekuitas dalam satu periode yang didapat dari kegiatan produktif atau kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan. Laba menurut akuntansi tentu berbeda dengan laba menurut perpajakan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (IAI, 2009) laba akuntansi dan laba menurut perpajakan adalah Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak, sedangkan laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terhutang (dilunasi).

Angka laba yang didapat dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan merupakan laba akuntansi, sedangkan laba menurut perpajakan sama dengan laba kena pajak yang didapat setelah koreksi fiskal dilakukan atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Koreksi fiskal perlu dilakukan karena ada perbedaan pengakuan antara pengakuan secara akuntansi dan secara perpajakan. Laba kena pajak ini yang merupakan dasar pengenaan pajak untuk menghitung besarnya beban pajak penghasilan pada suatu periode. Semakin besar laba kena pajak maka semakin besar beban pajak penghasilan. Tarif pajak efektif akan semakin besar jika beban pajak penghasilan besar, sedangkan tarif pajak efektif akan semakin kecil jika beban pajak penghasilan kecil. Tarif pajak efektif perusahaan dapat dihitung dengan membandingkan besar pajak terhutang dengan laba akuntansi.

Manajemen Laba

Begitu banyak definisi mengenai manajemen laba namun pada intinya yang dimaksud dengan manajemen laba itu sama yaitu menentukan laba sedemikian rupa sesuai dengan yang diinginkan dengan mengatur pendapatan dan beban. Berikut ada beberapa definisi mengenai manajemen laba, menurut Scott (2006) manajemen laba adalah *given that managers can choose accounting policies from a set of policies (for example, GAAP), it is natural to expect that they will choose policies so as to help achieve their objective. as mentioned, these choices can be motivated either by efficient markets and contracts, or by opportunism and rejection of market efficiency. Earnings management is the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective.*

Dapat disimpulkan dari definisi tersebut bahwa manajer dapat memilih kebijakan akuntansi dari standar akuntansi yang ada dan kebijakan yang dipilih dapat membantu dalam mencapai tujuan mereka yang dapat dimotivasi oleh kontrak kompensasi, kontrak hutang, *political costs* dan atau nilai pasar perusahaan untuk mencapai beberapa tujuan spesifik. Menurut Schipper (1989, dalam Rahmawati dkk., 2006) yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut).

Manajemen laba merupakan suatu fenomena yang sulit dihindari karena fenomena ini hanya merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan laporan keuangan harus disusun atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Dengan penggunaan dasar akrual ini maka transaksi yang ada diakui pada saat terjadinya dan dicatat dan dilaporkan pada periode bersangkutan. Tujuan penggunaan dasar akrual ini adalah agar laporan keuangan lebih informatif, laporan keuangan lebih mencerminkan keadaan sebenarnya. Sayangnya penggunaan dasar akrual ini memberikan manajemen kesempatan untuk menggerakkan angka akrual sehingga dapat mengubah angka laba yang dihasilkan padahal akrual sendiri ditujukan untuk menjadikan laporan yang sesuai fakta.

Motif atau tujuan manajemen laba dapat menentukan pola manajemen laba yang dipilih oleh manajemen. Pola manajemen laba yang biasa dilakukan menurut Scott (2006) yaitu:

1. *Taking a Bath* adalah pola manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dengan cara menjadikan laba perusahaan menjadi sangat rendah atau sangat tinggi pada periode berjalan dibanding dengan periode sebelum atau sesudahnya. Teknik *taking a bath* dilakukan dengan mengalihkan biaya pada periode mendatang ke periode kini dan mengakui kerugian ketika terjadi kondisi buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bias dihindari pada periode berjalan oleh perusahaan. Oleh karena bonus tahun ini tidak dapat diterima oleh manajemen maka manajemen melakukan pola ini untuk memaksimalkan kompensasi atau bonus yang akan diterimanya pada tahun berikutnya. *Taking a bath* biasanya dilakukan jika perusahaan mengadakan restrukturisasi atau reorganisasiseperti pergantian CEO.
2. *Income Minimization* (Minimalisasi Laba) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba pada laporan keuangan lebih rendah daripada laba sesungguhnya pada periode berjalan. Teknik yang dilakukan oleh manajemen yaitu dengan cara memindahkan beban ke periode kini agar laba dapat terlihat kecil ketika profitabilitas perusahaan sedang tinggi.
3. *Income Maximization* (Maksimalisasi Laba) adalah pola manajemen laba dengan membuat laba pada laporan keuangan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya pada periode berjalan. *Income maximization* dilakukan oleh manajemen dengan memindahkan beban ke periode mendatang, menunda biaya, dan memindahkan pendapatan ke periode kini. *Income Maximization* biasanya dilakukan manajemen dalam rangka memperoleh bonus tahunan.
4. *Income Smoothing* (Perataan Laba) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi terlihat konsisten dari periode ke periode. Tujuan dilakukannya *income smoothing* agar perusahaan terlihat stabil, hal ini didukung dengan adanya pemikiran investor yang lebih menyukai laba yang terlihat stabil karena dianggap memiliki resiko yang lebih rendah. Tindakan yang dilakukan manajemen adalah memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah untuk memperhalus fluktuasi laba.

Terdapat berbagai macam motivasi yang melatar belakangi adanya praktik manajemen laba. Berbagai motivasi perusahaan melakukan manajemen laba, menurut Scott (2000 dalam Djameluddin, 2007) yaitu:

1. *Bonus Scheme* (Program Bonus)
Dengan adanya bonus maka akan mendorong manajemen untuk melaporkan laba yang diperolehnya lebih tinggi dari laba sesungguhnya untuk memaksimalkan bonus yang akan diperolehnya yang dihitung atas dasar laba tersebut.
2. *Other Contractual Motivations* (Motivasi kontrak)
Secara umum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual, termasuk perjanjian hutang (*debts covenants*). Manajemen akan berusaha membuat laba dalam laporan keuangan terlihat meningkat ketika tingkat rasio hutang/ekuitas semakin tinggi.
3. *Political Motivations* (Motivasi Politik)
Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas pemerintah seperti subsidi dan perlindungan dari pesaing luar negeri, untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh, yang dilakukan dengan cara menurunkan laba.
4. *Taxation Motivations* (Motivasi Pajak)
Untuk tujuan penghematan pajak, perusahaan akan cenderung memperkecil perolehan laba sehingga pajak yang dibayarkan kepada pemerintah juga lebih kecil dari yang seharusnya.
5. *Changes of Chief Executive Officer* (Pergantian CEO)
CEO yang mendekati masa akhir jabatannya, cenderung melakukan *income maximization* untuk meningkatkan bonus mereka sedangkan untuk CEO yang kurang berhasil dalam memperbaiki kinerjanya cenderung melakukan manajemen laba agar kinerjanya terlihat bagus untuk menghindari pemecatan.
6. *Initial Public Offerings* (Penawaran Saham Perdana)
Perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO), cenderung melakukan manajemen laba dengan menaikkan labanya untuk menarik calon investor dan agar mendapatkan harga yang lebih tinggi atas sahamnya.

Sedangkan menurut Watt and Zimmerman (1986 dalam Halim, dkk, 2005) terdapat 3 (tiga) hal yang melatarbelakangi terjadinya praktik manajemen laba, antara lain:

1. *Bonus Plan Hypothesis*
Perusahaan yang memberikan bonus membuat manajemen melakukan manajemen laba untuk mendapatkan bonus yang tinggi. Bonus yang diberikan didasarkan pada laba yang diperoleh, oleh karena itu manajemen lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.
2. *Debt Covenant Hypothesis*
Perusahaan yang akan terancam melakukan pelanggaran perjanjian kredit, cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak kreditor.
3. *Political Cost Hypothesis*
Perusahaan besar lebih memilih metode akuntansi yang menurunkan laba dengan menunda menanggung laba. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan fasilitas dan subsidi dari pemerintah, laba yang tinggi membuat pemerintah untuk segera mengambil tindakan, misal: mengenakan *antitrust*, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

Akrual

Menurut standar akuntansi keuangan entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Penyusunan laporan keuangan dengan dasar akrual akan memberikan informasi yang lebih akurat kepada pengguna laporan keuangan karena tidak hanya memberikan informasi atas transaksi masa lalu yang

melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Dalam prosesnya konsep akrual ini memungkinkan adanya perilaku untuk manajer melakukan manajemen laba guna menaikkan atau menurunkan porsi angka akrual dalam laporan laba rugi.

Menurut Hidayati dan Zulaikha (2003) konsep akrual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *discretionary accrual* dan *non-discretionary accrual*. *Discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. Sedang *non-discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba yang wajar yang tunduk suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bila *non-discretionary accrual* dilanggar maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (tidak wajar), oleh karena itu *non-discretionary accrual* tidak relevan dalam penelitian ini. *Discretionary accrual* adalah bentuk akrual yang akan dianalisis dalam penelitian ini karena merupakan akrual tidak normal dan merupakan pilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi. Dalam *discretionary accrual* terdapat keikutsertaan manajemen untuk menentukan kebijakan akrual tersebut.

Total laba akrual dapat digunakan untuk menganalisis ada atau tidaknya manajemen laba. Total akrual terdiri atas dua komponen yaitu *non-discretionary accrual* dan *discretionary accrual*. Total akrual sendiri merupakan penjumlahan dari *non-discretionary accrual* dan *discretionary accrual*. Total laba akrual kemudian dipisahkan antara *non-discretionary accrual* dan *discretionary accrual* untuk setiap perusahaan dalam setiap tahun.

Pajak

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan umum. Ciri-ciri yang melekat pada pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Dari ciri-ciri yang melekat pada pajak maka dapat dilihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah pajak penghasilan yang salah satunya berasal dari pajak penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 pajak 34 penghasilan adalah "Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas". Menurut Undang-Undang Perpajakan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak yang dimaksud adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

a. Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi dan badan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dalam perpajakan Wajib Pajak Badan wajib menggunakan pembukuan dalam pencatatan usahanya.

b. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan

Reformasi pajak (*tax reform*) dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai. Dengan adanya *tax reform* ini diharapkan beban pajak akan makin adil dan wajar sehingga mendorong Wajib Pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak. Perubahan Undang-Undang Perpajakan terbaru di Indonesia terjadi tahun 2008 meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Hal ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007, UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan diper tegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008 ada 5 (lima) hal yang diatur dalam penurunan tarif, diantaranya:

1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh potongan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh.
2. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.
3. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud di atas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
5. Waktu enam bulan sebagaimana dimaksud di atas adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

Pada tabel 1 dapat dilihat perubahan tarif pajak dan lapisan penghasilan kena pajak badan sejak diundangkannya UU PPh tahun 1983 sampai dengan tahun 2008. Terdapat empat kali perubahan tarif pajak penghasilan badan yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku tahun 1984, tarif UU PPh tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang mulai berlaku tahun 2001, dan UU PPh tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009.

Tabel 1. Perbedaan Undang-Undang Tarif PPh Badan Tahun 1983, 1994, 2000, dan 2008

UU No.7 / 1983 PKP dan Tarif	UU No.10 / 1994 PKP dan Tarif	UU No. 17 / 2000 PKP dan Tarif	UU No.36 / 2008 PKP dan Tarif
PKP s/d 10.000.000 = 15%	PKP s/d 25.000.000 = 10%	PKP s/d 50.000.000 = 10%	Tarif tunggal yaitu: tahun 2009: 28%, tahun 2010: 25%, dan
PKP di atas 10.000.000 s/d 50.000.000 = 25%	PKP di atas 25.000.000 s/d 50.000.000 = 15%	PKP di atas 50.000.000 s/d 100.000.000 = 15%	untuk Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbuka mendapat penurunan tarif 5% yang diatur dalam PMK-
PKP di atas 50.000.000 = 35%	PKP di atas 50.000.000 = 30%	PKP di atas 100.000.000 = 30%	238/PMK.03/2008

PKP adalah Penghasilan Kena Pajak. PKP sendiri merupakan dasar yang akan digunakan dalam menghitung pajak terhutang dalam suatu periode. PKP dalam Wajib Pajak Badan adalah hasil dari laba bersih yang didapat setelah melakukan koreksi fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian dan zakat jika ada. Besar PKP inilah yang nantinya akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang Wajib Pajak Badan dengan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Insentif Pajak

Insentif yang diberikan biasanya ada dua bentuk yaitu insentif pajak dan insentif non-pajak. Sebelum membahas mengenai insentif pajak ada baiknya mengerti dahulu mengenai definisi insentif. Menurut T. Hani Handoko (2002) dalam Ardilla (2012), insentif merupakan perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Insentif pajak sendiri berarti suatu perangsang yang ditawarkan kepada wajib pajak, dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak. Tujuan dari insentif pajak salah satunya adalah untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu. Macam insentif pajak diantaranya adalah pembebasan pajak (*tax holiday*) dan pemotongan pajak (*tax allowance*). Namun dalam penelitian Yin dan Cheng (2004) dalam Subagyo dan Oktavia (2011) proksi yang digunakan untuk mengukur insentif pajak adalah perencanaan pajak. Yin dan Cheng (2004) berpendapat bahwa upaya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan dibatasi oleh perencanaan pajaknya (Subagyo dan Oktavia, 2010). Sedangkan dalam penelitian ini yang digunakan dalam mengukur insentif pajak adalah kewajiban pajak tangguhan bersih. Kewajiban pajak tangguhan bersih dipilih karena dianggap dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian (Yulianti, 2005). Dalam SFAS No. 109 dijelaskan bahwa perubahan dalam kewajiban pajak tangguhan bersih sama dengan perubahan kewajiban pajak tangguhan dikurangi perubahan aktiva pajak tangguhan bersih (Djamaluddin, dkk, 2007). Jumlah kenaikan (penurunan) kewajiban pajak tangguhan bersih dapat sama dengan jumlah beban (manfaat) pajak tangguhan pada periode yang bersangkutan, tetapi jumlahnya dapat juga berbeda. Berdasarkan PSAK No. 46 total perubahan dalam kewajiban pajak tangguhan bersih sama dengan beban (manfaat) pajak tangguhan periode yang bersangkutan pada perusahaan-perusahaan yang tidak mengalami merger, akuisisi, dan pelepasan usaha perusahaan, atau melaporkan item-item laba komprehensif lainnya (Djamaluddin, dkk, 2007).

Insentif Non-Pajak

Selain insentif pajak ada pula bentuk lain insentif yang diberikan yaitu insentif non-pajak. Insentif non-pajak adalah insentif yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri guna meningkatkan produktivitas karyawan dan mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam perusahaan. Insentif non-pajak dapat berupa fasilitas yang diberikan selain dari pajak. Insentif non-pajak dapat diukur dengan tingkat hutang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial menurut Guenther (1994).

a. Tingkat Hutang

Variabel ini dipilih berdasarkan *debt covenant hypothesis* yaitu perusahaan akan melakukan manajemen laba secara agresif untuk mencegah pelanggaran terhadap kontrak hutang. Perjanjian hutang bertujuan melindungi peminjam terhadap tindakan manajemen. Seperti kita ketahui sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dapat berasal dari modal sendiri dan dari luar (hutang). Tingkat hutang adalah besar kecilnya kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa di waktu yang akan datang.

Dalam Guenther (1994), Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran bunga atas hutang. Semakin besar bunga yang dibayarkan maka laba akan semakin kecil, hal ini menguntungkan karena pajak yang dibayarkan perusahaan pun akan semakin kecil. Sedangkan, semakin kecil bunga yang dibayarkan maka laba yang akan semakin besar otomatis pajak yang dibayar semakin besar. Hal ini dapat mendorong manajemen untuk menaikkan hutang agar mendapatkan keuntungan pengurangan pembayaran pajak.

b. Ukuran Perusahaan

Variabel ini dipilih berdasarkan *political cost hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan melakukan lebih banyak kebijakan yang akan menyebabkan laba menurun dengan maksud mengurangi efek politis. Perusahaan besar yang aktivitasnya berhubungan dengan publik atau perusahaan yang bergerak dalam industri strategis akan sangat mudah diawasi. Perusahaan besar akan lebih sensitif terhadap biaya politik, oleh karena itu perusahaan-perusahaan seperti ini akan cenderung mengelola labanya. Pada periode di mana perusahaan memperoleh laba yang tinggi perusahaan akan menggunakan metode akuntansi yang dapat meminimalkan laba bersih perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Jumlah karyawan, total asset, dan jumlah penjualan merupakan ukuran yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya laba yang dihasilkan akan semakin besar yang berarti jumlah pajak yang dibayarkan juga semakin besar. Perusahaan yang berada dalam skala besar lebih cenderung menggeser labanya ke periode yang labanya lebih rendah atau pada periode yang tarif pajaknya lebih rendah sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil.

c. Kepemilikan Manajerial

Variabel ini dipilih berdasarkan *bonus plan hypothesis* yaitu pemberian bonus kepada manajemen berdasarkan laba yang dicapai. Berdasarkan hipotesis tersebut dapat terlihat kecenderungan manajemen yang secara oportunistik mengelola laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka berdasarkan program kompensasi perusahaan. Jika pada suatu periode laba perusahaan rendah maka tindakan manajemen adalah menurunkan pendapatan sehingga laba perusahaan lebih rendah yang bertujuan untuk mendapatkan bonus di periode berikutnya. Jika pada suatu periode laba perusahaan tinggi (telah melebihi batas target) maka tindakan yang dilakukan manajemen adalah menurunkan pendapatan sehingga laba perusahaan akan menjadi lebih rendah. Tindakan ini dilakukan karena manajemen tidak akan mendapatkan bonus yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan *shareholders*.

Oleh karena itu dengan adanya kepemilikan manajerial oleh pihak manajemen diharapkan dapat mengurangi manajemen laba yang dilakukan. Kepemilikan manajerial

merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi diharapkan memiliki *discretionary accrual* yang negatif untuk memperoleh keuntungan pajak. Selain itu, pada perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi akan lebih mungkin untuk menggeser labanya ke periode yang labanya lebih rendah atau pada periode yang tarif pajaknya lebih rendah untuk mengurangi pajak yang dibayar atau untuk mendapat keuntungan pajak.

Pengembangan Hipotesis

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan dengan Manajemen Laba

Pada tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak Indonesia menerbitkan kembali Undang-Undang yang merevisi Pajak Penghasilan, yaitu UU No. 36 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 terjadi perubahan tarif pajak penghasilan badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal yaitu: 28% (tahun 2009), 25% (tahun 2010), dan 5% lebih rendah untuk perusahaan yang *go public* dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Tarif pajak badan ini mulai diefektifkan 1 Januari 2009, adanya pemberian insentif dengan penurunan tarif ini maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan lebih rendah. Hal ini tentunya menguntungkan bagi perusahaan karena dengan jumlah pajak yang dibayarkan lebih rendah berarti tarif pajak efektifnya akan semakin kecil. Jika manajemen berupaya untuk meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi manajemen untuk menurunkan laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak penghasilan yaitu tahun 2008. Pada penelitian ini juga ingin menguji apakah manajemen juga menurunkan laba pada tahun 2009 dalam menanggapi penurunan tarif dari 28% ke 25% untuk tahun 2010. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Martani (2011) menguji praktik manajemen laba dalam menanggapi perubahan tarif badan, hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif badan di Indonesia. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan adalah:

H1a: Perusahaan melakukan praktik manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak penghasilan tahun 2009.

H1b: Perusahaan melakukan praktik manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak penghasilan tahun 2010.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Manajemen Laba

Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah insentif pajak. Dalam penelitian ini kewajiban pajak tangguhan bersih yang akan digunakan sebagai insentif pajak. Yulianti (2005) dalam Wijaya dan Martani (2011) menyatakan bahwa kewajiban (aset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban (mempercepat beban atau menangguhkan pendapatan) untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Kewajiban pajak tangguhan akan meningkat jika perusahaan melaporkan laba akuntansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut perpajakan begitu pula sebaliknya. Koefisien kewajiban pajak tangguhan bersih bernilai positif menurut hasil penelitian Wijaya dan Martani menandakan bahwa semakin besar kewajiban pajak tangguhan bersih maka semakin besar nilai *discretionary accrualnya*. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan adalah:

H2: Kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Manajemen Laba

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Guenther (1994) menyatakan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran bunga atas hutang. Hutang berbanding terbalik dengan laba, jika hutang semakin besar maka jumlah bunga atas hutang akan meningkat maka laba akan semakin kecil begitu pula sebaliknya. Laba yang semakin kecil atas besarnya bunga menguntungkan perusahaan dalam pembayaran pajak karena pajak yang dibayarkan semakin kecil. Dalam hal ini terdapat adanya pengaruh pajak, yaitu sebagai faktor yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan hutangnya. Jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dalam pajak maka salah satu yang dapat dilakukan adalah meningkatkan

hutang dengan begitu bunga pinjaman dapat dijadikan biaya yang dapat mengurangi pajak perusahaan. Dalam hal ini hutang bertindak sebagai *tax shields* karena dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk pembayaran bunga kepada pihak yang memberikan hutang. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Guenther dapat membuktikan bahwa *current accrual* berhubungan positif dengan tingkat hutang. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan adalah:

H3: Tingkat hutang berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Richardson dan Lanis (2007), Guenther (1994), dan Watts dan Zimmerman (1978) dalam Wijaya dan Martani (2011) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan lebih sensitif terhadap biaya politik dan dengan begitu akan lebih mungkin untuk menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya laba yang dihasilkan juga akan semakin besar, sehingga pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar. Perusahaan besar akan lebih mungkin untuk mengurangi laba laporan keuangan dan menunda laba kena pajak sebagai respon terhadap penurunan tarif pajak untuk mendapatkan keuntungan pajak. Dalam penelitiannya Guenther (1994) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi *discretionary accrual*. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Guenther dapat membuktikan bahwa *current accrual* berhubungan negatif dengan ukuran perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan adalah:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

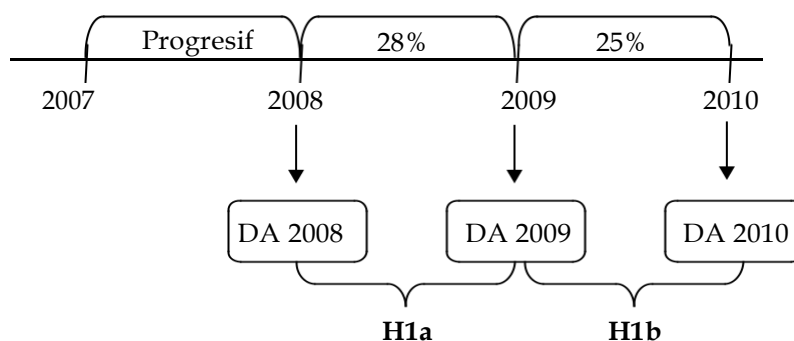
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan *bonus plan hypothesis* yaitu pemberian bonus kepada manajemen berdasarkan laba yang dicapai dapat terlihat kecenderungan manajemen yang secara oportunistik mengelola laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka berdasarkan program kompensasi perusahaan. Oleh karena itu dengan adanya kepemilikan manajerial oleh pihak manajemen diharapkan dapat mengurangi manajemen laba yang dilakukan. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi diharapkan memiliki *discretionary accrual* yang negatif untuk memperoleh keuntungan pajak. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan adalah:

H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

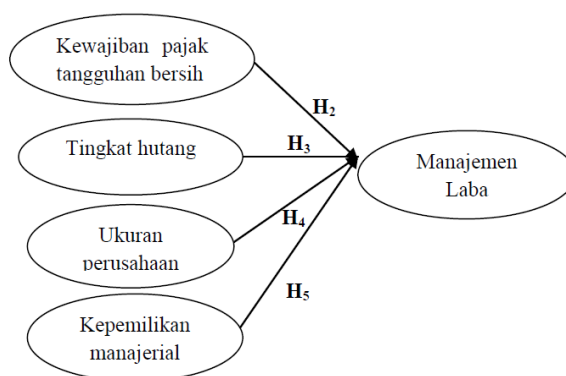
Rerangka Berpikir dan Model Analisis

Berikut rerangka berpikir untuk perubahan tarif pajak penghasilan badan dengan manajemen laba



Gambar 1. Rerangka Berpikir

Berikut model analisis untuk pengaruh insentif pajak dan insentif-non pajak terhadap manajemen laba



Gambar 2. Model Analisis

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan tujuan menguji pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menguji faktor apa saja yang mempengaruhi praktik manajemen laba.

Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang bisa mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu insentif pajak dan insentif non-pajak yang terdiri dari tingkat hutang, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accrual*. Definisi operasional dan Pengukuran variabel yang digunakan penelitian ini adalah:

- a. *Discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. *Discretionary accrual* merupakan alat yang paling sering dilakukan untuk melakukan manajemen laba. *Discretionary accrual* dihitung menggunakan model Jones yang dimodifikasi oleh Dechow *et al* (1995) yaitu sebagai berikut:

1. Menghitung total akrual

$$TACC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TACC_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NI_{it} = Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} = Kas dari operasi (*cash flow operation*) perusahaan i pada tahun t

2. Menghitung tingkat akrual yang normal

Total akrual merupakan penjumlahan antara *non discretionary accrual* dengan *discretionary accrual* yang dinyatakan pada persamaan berikut ini:

$$TACC_{it} = NDA_{it} + DA_{it}$$

Keterangan:

TACC_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NDAit = Nondiscretionary akrual perusahaan i pada tahun t
DAit = Discretionary akrual perusahaan i pada tahun t

Tingkat akrual yang normal dapat dihitung dengan memisahkan *discretionary accrual* dengan *non discretionary accrual*, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$TACCit / TAit-1 = \alpha_1 (1/TAit-1) + \beta_1 ((\Delta REVit - \Delta RECit) / TAit-1) + \beta_2 (PPEit/TAit-1) + \epsilon_{it} \quad 51$$

Keterangan:

TACCit = Total akrual perusahaan i pada tahun t

TAit-1 = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

$\Delta REVit$ = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

$\Delta RECit$ = Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

PPEit = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

ϵ_{it} = error term perusahaan i pada tahun t

Untuk menentukan *non-discretionary accruals* yaitu dengan:

$$NDAit = \alpha_1 (1/TAit-1) + \beta_1 ((\Delta REVit - \Delta RECit) / TAit-1) + \beta_2 (PPEit/TAit-1)$$

3. Menghitung tingkat akrual yang tidak normal

$$DAit = TACCit / TAit-1 - [\alpha_1 (1/TAit-1) + \beta_1 ((\Delta REVit - \Delta RECit) / TAit-1) + \beta_2 (PPEit/TAit-1)]$$

- b. Kewajiban pajak tangguhan bersih adalah selisih beda waktu antara laba akuntansi dan laba perpajakan. Nilai perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih didapat dari laporan keuangan posisi keuangan perusahaan. Kewajiban pajak tangguhan bersih dipilih sebagai insentif pajak karena dianggap dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba. Kewajiban (aset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban (mempercepat beban atau menangguhkan pendapatan) untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih dapat dihitung dengan menggunakan aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang disajikan dalam catatan pajak penghasilan perusahaan yaitu perubahan kewajiban pajak tangguhan dikurangi perubahan aktiva pajak tangguhan bersih dibagi total aset awal tahun. Jumlah kenaikan (penurunan) kewajiban pajak tangguhan bersih sama dengan jumlah beban (manfaat) pajak tangguhan pada periode yang bersangkutan pada perusahaan-perusahaan yang tidak mengalami merger, akuisisi, dan pelepasan usaha perusahaan, atau melaporkan item-item laba komprehensif lainnya. Variabel ini diberi simbol NDTL, NDTL menggambarkan perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih. Untuk menghitung kewajiban pajak tangguhan bersih (NDTL) dapat dihitung menggunakan rumus:

$$NDTL = (\Delta \text{kewajiban pajak tangguhan} - \Delta \text{aktiva pajak tangguhan bersih}) / \text{total aset awal tahun}$$

- c. Tingkat hutang adalah besar kecilnya kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa di waktu yang akan datang. Dalam Guenther (1994), Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran bunga atas hutang. Variabel ini diberi simbol DEBT yang menggambarkan tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat hutang dapat diukur menggunakan rasio

kewajiban jangka panjang terhadap total aset awal tahun. DEBT dapat dihitung menggunakan rumus:

$$DEBT = \frac{\text{kewajiban jangka panjang}}{\text{total aset awal tahun}}$$

- d. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Menurut Watts dan Zimmerman (1986) perusahaan yang berskala besar akan lebih sensitif terhadap biaya politik, oleh karena itu perusahaan akan lebih mungkin untuk menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dari total aset yang dimiliki perusahaan karena total aset memiliki nilai yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai pasar saham dan penjualan. Variabel ini diberi simbol SIZE yang menggambarkan besar kecilnya ukuran perusahaan. SIZE dapat diukur dengan menggunakan logaritma total aset.

$$SIZE = \log (\text{nilai buku total aset})$$

- e. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen. Variabel ini diberi simbol MGTOWN yang dapat diukur menggunakan skala rasio yang dihitung dari persentase kepemilikan dewan direksi dari total saham yang beredar.

$$MGTOWN = \frac{\text{persentase (\%) kepemilikan dewan direksi}}{\text{total saham beredar}}$$

Berikut tabel ringkasan variabel dan indikatornya:

Tabel 2. Variabel dan Indikator

Variabel	Indikator	Sumber
<i>Discretionary accrual</i>	$TACC_{it} / TA_{it-1} - [\alpha_1 (1/TA_{it-1}) + \beta_1 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / TA_{it-1}) + \beta_2 (PPE_{it} / TA_{it-1})]$	Subagyo dan Oktavia (2010)
Kewajiban pajak tangguhan bersih	$(\Delta \text{Kewajiban pajak tangguhan} - \Delta \text{aktiva pajak tangguhan bersih}) / \text{total aset awal tahun}$	Wijaya dan Martani (2011)
Tingkat hutang	Kewajiban jangka panjang / total aset awal tahun	Subagyo dan Oktavia (2010)
Ukuran perusahaan	$\log (\text{nilai buku total aset})$	Subagyo dan Oktavia (2010)
Kepemilikan manajerial	Persentase (%) kepemilikan dewan direksi / total saham beredar	Subagyo dan Oktavia (2010)

Sumber: Data diolah

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang akan diteliti adalah data kuantitatif berupa dokumen (laporan keuangan perusahaan). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau diperoleh tidak langsung dari sumber pertama dalam bentuk sudah jadi yang bersifat dokumenter. Sumber data berupa laporan keuangan perusahaan diperoleh langsung dari publikasi laporan keuangan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengadakan pencatatan dan penelaahan terhadap dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian ini.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Kriteria-kriteria yang telah ditentukan untuk pengambilan sampel, yaitu:

- a. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.
- b. Perusahaan yang laporan keuangannya berakhir pada 31 Desember.
- c. Laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah.
- d. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan (auditan) dari tahun 2007-2010 dan memiliki kelengkapan data keuangan yang diperlukan untuk pengukuran seluruh variabel.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai analisis perubahan tarif pajak badan 2008, insentif pajak, insentif non pajak dan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 sampai 2010.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis H1a dan H1b menggunakan uji beda atau *t-test* yaitu teknik analisa statistik yang dipakai untuk melihat ada tidaknya perbedaan “mean” dari dua kelompok sampel. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah *two sample t-test* yang menggunakan program SPSS. Dalam penelitian ini manajemen laba dapat dilihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008 untuk tahun 2008, 2009 dan 2010. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Jika data berdistribusi normal, pengujian hipotesis yang digunakan yaitu *paired sampel T-test* yang dengan menggunakan program SPSS. Dasar pengambilan keputusan pada uji-t:
 - a. Menentukan *level of significance* (α), yaitu sebesar 5% dengan derajat kebebasan (df) sebesar $n-1$.
 - b. Membandingkan probabilitas (p) z-hitung dengan $\alpha = 5\%$. Penarikan kesimpulan pada uji ini didasarkan pada:
 - Apabila nilai probabilitas (p) $< 0,05$ maka hipotesis diterima.
 - Apabila nilai probabilitas (p) $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.
2. Jika data tidak berdistribusi normal, maka teknik uji beda dua sample berpasangan yang digunakan adalah uji peringkat Wilcoxon (*wilcoxon signed rank test*) yang merupakan uji statistik nonparametrik. Langkah-langkah dalam pengujian ini adalah:
 - a. Menentukan *level of significance* (α), yaitu sebesar 5% dengan derajat kebebasan (df) sebesar $n-1$.
 - b. Membandingkan probabilitas (p) z-hitung dengan $\alpha = 5\%$. Penarikan kesimpulan pada uji ini didasarkan pada:
 - Apabila nilai probabilitas (p) $< 0,05$ maka hipotesis diterima.
 - Apabila nilai probabilitas (p) $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Pengujian hipotesis H2 sampai dengan H5 dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang meliputi uji koefisien determinasi (R^2), uji kelayakan model (uji statistik F), dan uji signifikan parameter individual (uji statistik t). Pengujian regresi yaitu uji regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 20.0.0 *Full Version*. Berdasarkan variabel-variabel yang digunakan, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda dengan model sebagai berikut:

$$DA_{it} = a + b_1 NDTL_{it} + b_2 DEBT_{it} + b_3 SIZE_{it} + b_4 MGTOWN_{it}$$

Keterangan:

- DA = *Discretionary accruals* adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. *Discretionary accrual* dihitung menggunakan model Jones yang dimodifikasi oleh *Dechow et al* (1995).
- NDTL = Kewajiban pajak tangguhan bersih adalah selisih beda waktu antara laba akuntansi dan laba perpajakan.
- DEBT = Tingkat hutang adalah besar kecilnya kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa di waktu yang akan datang.
- SIZE = Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, dalam hal ini dilihat dari nilai buku total aset.
- MGTOWN = Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer. Dalam hal ini dapat diukur menggunakan skala rasio yang dihitung dari persentase kepemilikan dewan direksi dari total saham yang beredar.
- a = konstanta
- b = koefisien regresi

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R^2) ini berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar analisis uji statistik F adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.
2. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Dasar analisis uji statistik t adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_o ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
2. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_o diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007-2010. Di dalam industri manufaktur ini terdapat beberapa sektor seperti, industri dasar dan kimia; industri lain-lain; serta industri *consumer goods*. Dalam penelitian ini menguji hipotesis berdasarkan sektor-sektor dalam industri manufaktur. Berdasarkan hasil pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel

yang telah ditetapkan pada tabel 3, maka diperoleh 75 perusahaan sebagai sampel penelitian H1a dan H1b, sedangkan untuk H2-H5 diperoleh 55 perusahaan sebagai sampel penelitian. Pada sampel untuk perusahaan H1 kode perusahaan yang menjadi outlier adalah BATA, EKAD, POLY dan UNTX. Pada sampel untuk perusahaan H2-H5 kode perusahaan yang menjadi outlier adalah APLI, ASII, AUTO, BATA, CEKA, CPIN, EKAD, FASW, INAI, INDS, JECC, JPRS, KICI, LION, LPIN, MERK, MLBI, MLIA, PAFI, POLY, PRAS, SAIP, ULTI dan UNTX.

Tabel 3. Sampel Penelitian

Keterangan	Perusahaan
Populasi: Perusahaan Manufaktur terdaftar di BEI	139
Tidak memenuhi kriteria:	
1. Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI tahun 2007-2010	(14)
2. Perusahaan yang laporan keuangannya tidak berakhir 31 Desember	(2)
3. Laporan keuangan tidak dinyatakan dalam rupiah	(5)
4. Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan (auditan) tahun 2007-2010 dan tidak memiliki kelengkapan data yang diperlukan untuk pengukuran seluruh variabel	(39)
Jumlah	79
Uji outlier	(4)
Jumlah perusahaan	75

Sumber: www.idx.co.id (diolah)

Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba (DA), tingkat hutang (DEBT), ukuran perusahaan (SIZE), kepemilikan manajerial (MGTOwn).

Manajemen Laba (DA)

Perhitungan manajemen laba dilakukan dengan menggunakan *discretionary accrual* (DA) yang menggunakan model Jones yang dimodifikasi oleh Dechow dkk. (1995). Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Manajemen Laba H1

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA 2008	75	-,27435	,27806	-,0044901	,10537127
DA 2009	75	-,19933	,24699	-,0199402	,07573654
DA 2010	75	-,21253	,39488	,0098517	,11058747
Valid N (listwise)	75				

Sumber: Data diolah

Nilai DA pada tahun 2008 berkisar antara -0,27435 sampai 0,27806, sehingga menghasilkan

nilai rata-rata 0,0044901 dengan standar deviasi 0,10537127 dari sampel sejumlah 75 perusahaan yang diteliti. DA terendah pada tahun 2008 terdapat pada PT. Jaya Pari Steel Tbk. sebesar -0,27435, sedangkan yang tertinggi terdapat pada PT. Indospring Tbk. sebesar 0,27806. Nilai DA pada tahun 2009 berkisar antara -0,19933 sampai 0,24699, sehingga menghasilkan nilai rata-rata -0,0199402 dengan standar deviasi 0,07573654 dari sampel sejumlah 75 perusahaan yang diteliti. DA terendah pada tahun 2009 terdapat pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. sebesar -0,19933 sedangkan yang tertinggi terdapat pada PT. Mulia Industrindo Tbk. sebesar 0,24699. Nilai manajemen laba pada tahun 2010 berkisar antara -0,21253 sampai 0,39488, sehingga menghasilkan nilai rata-rata 0,0098517 dengan standar deviasi 0,11058747 dari sampel sejumlah 75 perusahaan yang diteliti. DA terendah pada tahun 2010 terdapat pada PT. Indospring Tbk. sebesar -0,21253, sedangkan yang tertinggi terdapat pada PT. Cahaya Kalbar Tbk. sebesar 0,39488.

Tabel 5. Statistik Deskriptif Manajemen Laba H2-H5

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA	165	-,18567	,15790	,0003440	,06640636
Valid N (listwise)	165				

Sumber: Data diolah

Nilai manajemen laba berkisar antara -0,18567 sampai 0,15790, sehingga menghasilkan nilai rata-rata 0,0003440 dengan standar deviasi 0,06640636 dari sampel sejumlah 165 yang diteliti. DA terendah pada tahun 2008 terdapat pada PT. Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. sebesar -0,18567, pada tahun 2009 terdapat pada PT. Sucaco Tbk. sebesar -0,12362, dan pada tahun 2010 terdapat pada PT. Karwell Indonesia Tbk. sebesar -0,18269. Sedangkan DA tertinggi pada tahun 2008 terdapat pada PT. Lion Mesh Prima Tbk. sebesar 0,14004, pada tahun 2009 terdapat pada PT. Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. sebesar 0,15790, dan pada tahun 2010 terdapat pada PT. Delta Djakarta Tbk. sebesar 0,15689.

Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih (NDTL)

Perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih (NDTL) diukur dengan cara perubahan kewajiban pajak tangguhan dikurangi perubahan aktiva pajak tangguhan bersih dibagi dengan total aset awal tahun. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Statistik Deskriptif Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NDTL	165	-,93910	,06770	-,0073967	,07512015
Valid N (listwise)	165				

Sumber: Data diolah

Nilai kewajiban pajak tangguhan bersih berkisar antara -0,93910 sampai 0,06770, sehingga menghasilkan nilai rata-rata -0,0073967 dengan standar deviasi 0,07512015 dari sampel sejumlah 165 yang diteliti. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, kewajiban pajak tangguhan bersih pada perusahaan sampel sebesar -0,73% dibandingkan total aset awal tahun. Angka rata-rata kewajiban pajak tangguhan bersih pada perusahaan sampel tersebut mencerminkan angka yang relatif rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban pajak tangguhan bersih dibandingkan total aset awal tahun pada perusahaan sampel juga relatif rendah. NDTL terendah pada tahun 2008, 2009, dan 2010 terdapat PT. Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. dengan nilai secara berturut-turut sebesar -0,93910, -0,17677, dan -0,03533. Sedangkan NDTL

tertinggi pada tahun 2008 dan tahun 2010 terdapat pada PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk. sebesar 0,06770 dan 0,62669, dan pada tahun 2009 terdapat pada PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk. sebesar 0,0348.

Tingkat Hutang (DEBT)

Tingkat hutang dihitung dengan menggunakan rasio kewajiban jangka panjang dibagi dengan total aset awal tahun. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Statistik Deskriptif Tingkat Hutang

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DEBT	165	,00000	2,19557	,1836003	,27867044
Valid N (listwise)	165				

Sumber: Data diolah

Nilai tingkat hutang berkisar antara 0 sampai 2,19557, sehingga menghasilkan nilai rata-rata 0,1836003 dengan standar deviasi 0,27867044 dari sampel sejumlah 165 yang diteliti. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, tingkat hutang pada perusahaan sampel sebesar 18,36% dibandingkan total aset awal tahun. Angka rata-rata tingkat hutang pada perusahaan sampel tersebut mencerminkan angka yang relatif rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat hutang dibandingkan total aset awal tahun pada perusahaan sampel juga relatif rendah. DEBT terendah pada tahun 2008 dan 2009 terdapat pada PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk. secara berturut-turut sebesar 0, 0,00122, sedangkan pada tahun 2010 terdapat pada PT. Aneka Kemasindo Utama sebesar 0,00009. Sedangkan DEBT tertinggi pada tahun 2008, 2009, dan 2010 terdapat pada PT. Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. secara berturut-turut sebesar 2,19557, 1,69546, dan 1,72380.

Ukuran Perusahaan (SIZE)

Perhitungan ukuran perusahaan dilakukan dengan logaritma dari nilai buku total aset akhir tahun. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE	165	10,45301	13,67464	12,0676106	,64929748
Valid N (listwise)	165				

Sumber: Data diolah

Nilai ukuran perusahaan berkisar antara 10,45301 sampai 13,67464, sehingga menghasilkan nilai rata-rata 12,0676106 dengan standar deviasi 0,64929748 dari sampel sejumlah 165 yang diteliti. SIZE terendah pada tahun 2008, 2009, dan 2010 terdapat pada PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk. secara berturut-turut sebesar 10,63203, 10,51183, dan 10,45301. Sedangkan SIZE tertinggi pada tahun 2008, 2009, dan 2010 terdapat pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. secara berturut-turut sebesar 13,59763, 13,60620, dan 13,67464.

Kepemilikan Manajerial (MGTOWN)

Perhitungan kepemilikan manajerial dihitung dari persentase kepemilikan dewan direksi dari total saham yang beredar. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Statistik Deskriptif Kepemilikan Manajerial

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MGTOWN	165	,00000	,09580	,0048127	,0169575
Valid N (listwise)	165				

Sumber: Data diolah

Nilai ukuran perusahaan berkisar antara 0 sampai 0,9580, sehingga menghasilkan nilai rata-rata 0,0048127 dengan standar deviasi 0,0169575 dari sampel sejumlah 165 yang diteliti. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, kepemilikan dewan direksi pada perusahaan sampel sebesar 0,48% dibandingkan total saham beredar. Angka rata-rata kepemilikan dewan direksi pada perusahaan sampel tersebut mencerminkan angka yang relatif rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial direksi dibandingkan total saham beredar pada perusahaan sampel juga relatif rendah. Hampir sebagian besar perusahaan sampel memiliki nilai MGTOWN sebesar 0. MGTOWN tertinggi pada tahun 2008, 2009, dan 2010 terdapat pada PT. Bentonjaya Manunggal Tbk. secara berturut-turut sebesar 0,09580, 0,09580, dan 0,09580.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis H1a dan H1b menggunakan uji beda atau *t-test* yaitu teknik analisa statistik yang dipakai untuk melihat ada tidaknya perbedaan "mean" dari dua kelompok sampel. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah *two sample t-test* dengan menggunakan program SPSS. Dalam penelitian ini manajemen laba dapat diketahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008 untuk tahun 2008, 2009 dan 2010. Pengujian hipotesis H1a menggunakan uji *paired t-test* karena data berdistribusi normal. Pada tabel 8 dapat dilihat hasil signifikansi dari uji *paired t-test* sebesar 0,339 dan hasil ini > 0,05 sehingga H0 diterima dan H1a ditolak.

Tabel 10. Hasil Uji Beda Rata-Rata H1a

Tahun	Rata-Rata	Kesimpulan
2008	-0,0044901	H _{1a} ditolak
2009	-0,0199402	
Sig = 0,339		

Sumber: Data diolah

Pengujian hipotesis H1b menggunakan uji *paired t-test* karena data berdistribusi normal. Pada tabel 11 dapat dilihat nilai signifikansi hasil uji *paired t-test* sebesar 0,041 dan hasil ini < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1b diterima.

Tabel 11. Hasil Uji Beda Rata-Rata H1b

Tahun	Rata-Rata	Kesimpulan
2009	-0,0199402	H _{1b} diterima
2010	0,0098517	
Sig = 0,041		

Sumber: Data diolah

Uji hipotesis H2 sampai H5 dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk men-

guji kelayakan model persamaan regresi dan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil analisis regresi NDTL, DEBT, SIZE, dan MGTOWN terhadap DA:

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi

Variabel	Prediksi Tanda	Koefisien	t-hitung	Sig
Konstanta	-	0,063	-0,617	0,538
NDTL	+	0,266	2,964	0,004
DEBT	+	0,042	1,743	0,083
SIZE	+	0,005	0,579	0,563
MGTOWN	-	0,230	-0,717	0,474
F statistik = 2,773 Sig = 0,029		R Square = 0,065		

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 12, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$DA_{it} = -0,063 + 0,266NDTL_{it} + 0,042 DEBT_{it} + 0,005 SIZE_{it} - 0,230MGTOWN_{it}$$

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan analisis regresi pada tabel 12 besarnya R² adalah 0,065, hal ini berarti 6,5% variasi *discretionary accrual* dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen, yaitu kewajiban pajak tangguhan bersih (NDTL), tingkat hutang (DEBT), ukuran perusahaan (SIZE), dan kepemilikan manajerial (MGTOWN). Akan tetapi, sisanya (100% - 6,5% = 93,5%) dijelaskan oleh sebab lain yang di luar model penelitian.

b. Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dari hasil uji statistik F pada tabel 12 diketahui bahwa nilai F hitung statistik adalah 2,773 dengan signifikansi 0,029. Oleh karena F hitung 2,773 dengan signifikansi 0,029 < 0,05, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa secara simultan tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ditolak dan hipotesis alternatif yang menyatakan secara simultan ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diterima.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 12 menunjukkan hasil pengujian regresi berganda di mana dapat dilihat bahwa koefisien regresi (β_1) untuk NDTL sebesar +0,266 menunjukkan bahwa kewajiban pajak tangguhan bersih mempunyai pengaruh positif sebesar 0,266 terhadap variasi manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accrual*. Artinya, bila terjadi kenaikan NDTL sebesar 1% dan variabel independen lain nilainya tetap, maka akan terjadi kenaikan DA sebesar 0,266, demikian juga sebaliknya. Oleh karena nilai signifikansi pada kewajiban pajak tangguhan bersih sebesar 0,004 ≤ 0,05 maka H2 diterima. Adapun H2 yang berbunyi kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Koefisien regresi (β_2) untuk DEBT sebesar +0,042 menunjukkan bahwa tingkat hutang mempunyai pengaruh positif sebesar 0,042 terhadap variasi manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accrual*. Artinya, bila terjadi kenaikan DEBT sebesar 1% dan variabel independen lain nilainya tetap, maka akan terjadi kenaikan DA sebesar 0,042, demikian juga sebaliknya. Oleh karena nilai signifikansi pada tingkat hutang sebesar 0,083 > 0,05 maka H3

ditolak. Oleh karena itu hasil uji statistik *t* pada variabel tingkat hutang yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan mengindikasikan bahwa tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Koefisien regresi (β_3) untuk SIZE sebesar +0,005 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif sebesar 0,005 terhadap variasi manajemen laba. Artinya, bila terjadi kenaikan SIZE sebesar 1% dan variabel independen lain nilainya tetap, maka akan terjadi kenaikan DA sebesar 0,005, demikian juga sebaliknya. Oleh karena nilai signifikansi pada kewajiban pajak tangguhan bersih sebesar 0,563 > 0,05 maka H4 ditolak. Penolakan hipotesis keempat mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Koefisien regresi (β_4) untuk MGTOWN sebesar -0,230 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif sebesar 0,230 terhadap variasi manajemen laba. Artinya, bila terjadi kenaikan MGTOWN sebesar 1% dan variabel independen lain nilainya tetap, maka akan terjadi penurunan DA sebesar 0,230, demikian juga sebaliknya. Oleh karena nilai signifikansi pada kewajiban pajak tangguhan bersih sebesar 0,474 > 0,05 maka H5 ditolak. Penolakan hipotesis kelima mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis 1

Dari hasil yang diperoleh dari uji *paired t-test* terlihat bahwa rata-rata nilai DA 2008 lebih besar dari DA 2009. Hal ini menandakan adanya perbedaan nilai *discretionary accrual*, perusahaan melakukan *decreasing income* di tahun 2009. Dari tabel juga dapat dilihat bahwa nilai signifikansi hasil uji sebesar 0,339 dan hasil ini > 0,05 sehingga H0 diterima dan H1a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2009.

Dari hasil yang diperoleh terhadap uji *paired t-test* dapat dilihat bahwa rata-rata DA tahun 2009 lebih kecil dibandingkan dengan DA tahun 2010 yang menandakan adanya penggeseran laba dari tahun 2009 ke tahun 2010 sehingga laba pada tahun 2010 meningkat. Dari hasil pengujian didapat nilai signifikansi hasil uji *paired t-test* sebesar 0,041 dan hasil ini < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1b diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak penghasilan tahun 2010 yang dapat dilihat dari adanya perbedaan *discretionary accrual* pada tahun 2009 dan 2010 dan nilai tersebut signifikan.

Hasil H1a yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Zulaikha (2003). Mereka tidak berhasil membuktikan bahwa perusahaan melakukan praktik manajemen laba dalam menanggapi perubahan tarif pajak. Tetapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Fitriyani, dkk (2012). Mereka berhasil membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak penghasilan badan. Dengan demikian maka hipotesis1a yang diajukan ditolak yang berarti bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan, praktik manajemen laba masih tidak dilakukan perusahaan. Hal ini dapat dikarenakan rentang waktu antara pengesahan Undang-Undang Perpajakan yang baru dengan akhir periode pelaporan cukup singkat, mungkin waktu yang ada tidak cukup untuk menunda pelaporan laba (Setiawati dalam Hidayati dan Zulaikha, 2003).

Hasil H1b yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, dkk (2012). Mereka berhasil membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak penghasilan badan. Tetapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Hidayati dan Zulaikha (2003). Mereka tidak berhasil membuktikan bahwa perusahaan melakukan praktik manajemen laba dalam menanggapi perubahan tarif pajak. Dengan demikian maka hipotesis1b yang diajukan diterima yang berarti bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan, praktik manajemen laba masih tetap dilakukan perusahaan. Hal ini dapat dikarenakan perusahaan telah melakukan persiapan *tax plan* yang cukup baik karena waktu antara pengesahan Undang-Undang Perpajakan yang baru dengan saat penurunan tarif dari tahun 2009 ke 2010 cukup lama.

Hasil Pengujian Hipotesis 2

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara kewajiban pajak tangguhan bersih (NDTL) dengan manajemen laba. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur menggunakan *discretionary accrual*. Hal ini dapat diartikan semakin besar kewajiban pajak tangguhan bersih (NDTL), maka *discretionary accrual* perusahaan juga akan semakin besar. Dengan demikian, H2 yang diajukan bahwa “Kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh positif terhadap manajemen laba” dapat diterima dalam penelitian ini dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Martani (2011). Mereka berhasil membuktikan bahwa kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh signifikan baik terhadap *profit firm* maupun *loss firm*. Hal ini dapat dikarenakan perusahaan menggunakan kewajiban pajak tangguhan bersih untuk memperoleh penghematan pajak. Kewajiban (aset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menanggukuhkan pengakuan beban (mempercepat beban atau menanggukuhkan pendapatan) untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kewajiban pajak tangguhan bersih (NDTL) berpengaruh secara signifikan dilakukannya manajemen laba oleh perusahaan.

Hasil Pengujian Hipotesis 3

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat hutang (DEBT) terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H3 yang diajukan bahwa “Tingkat hutang berpengaruh positif terhadap manajemen laba” tidak diterima dalam penelitian ini.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010) dan Wijaya dan Martani (2011). Mereka tidak berhasil membuktikan bahwa tingkat hutang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994) yang menemukan bahwa tingkat hutang berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan Alim (2009) bahwa tingkat hutang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa rata-rata proporsi hutang jangka panjang perusahaan adalah relatif rendah (lihat tabel 5). Proporsi yang relatif rendah ini dapat dikarenakan bahwa pada umumnya perusahaan akan cenderung menghindari risiko bisnis yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan hutang perusahaan. Semakin tinggi penggunaan hutang oleh perusahaan, maka risiko bisnis perusahaan tersebut akan semakin tinggi pula. Seperti yang kita ketahui berdasarkan *debt covenant hypothesis*, perusahaan yang akan terancam melakukan pelanggaran perjanjian kredit, cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak kreditor. Dalam Guenther (1994), Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran bunga atas hutang. Semakin besar bunga yang dibayarkan maka laba akan semakin kecil. Jika dikaitkan dengan manajemen laba, DEBT yang relatif rendah tersebut menunjukkan bahwa perusahaan di dalam sampel diindikasikan tidak dapat memanfaatkan dengan maksimal biaya bunga yang timbul dari hutang jangka panjang tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak untuk mendapatkan keuntungan pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis 4

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan (SIZE) dengan manajemen laba. Dengan demikian, H4 yang diajukan bahwa “Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba” tidak dapat diterima dalam penelitian ini.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alim (2009), Subagyo dan Oktavia (2010) dan Wijaya dan Martani (2011). Mereka tidak berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan penghematan pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dikarenakan pola perilaku dan motivasi yang berbeda antara manajemen badan usaha di Amerika dan Indonesia (Alim, 2009). Berdasarkan *political cost hypothesis* yang

menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan melakukan lebih banyak kebijakan yang akan menyebabkan laba menurun dengan maksud mengurangi efek politis. Perusahaan besar akan lebih sensitif terhadap biaya politik, oleh karena itu perusahaan-perusahaan seperti ini akan cenderung mengelola labanya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan fasilitas dan subsidi dari pemerintah, laba yang tinggi akan membuat pemerintah mengambil tindakan seperti, menaikkan tarif pajak penghasilan karena itu perusahaan menjaga agar laba yang dilaporkan tidak terlalu tinggi. Jika dikaitkan dengan manajemen laba, perusahaan belum memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi pengaruh proses politik yang dihadapi perusahaan, mengembangkan keahlian dalam perencanaan pajak, serta mengatur cara-cara yang dapat dilakukan perusahaan guna mencapai penghematan pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis 5

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial (MGTOWN) dengan manajemen laba. Dengan demikian, H5 yang diajukan bahwa "Kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap manajemen laba" tidak dapat diterima dalam penelitian ini.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010). Mereka tidak berhasil membuktikan bahwa kepemilikan manajerial (MGTOWN) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan penghematan pajak. Berdasarkan *bonus plan hypothesis* yaitu pemberian bonus kepada manajemen berdasarkan laba yang dicapai. Berdasarkan hipotesis tersebut dapat terlihat kecenderungan manajemen yang secara oportunistik mengelola laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka berdasarkan program kompensasi perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial oleh pihak manajemen diharapkan dapat mengurangi manajemen laba yang dilakukan. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi diharapkan memiliki *discretionary accrual* yang negatif untuk memperoleh keuntungan pajak. Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba hal ini dapat dikarenakan kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh dewan direksi sangat kecil jumlahnya jika dibandingkan jumlah saham beredar. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa rata-rata proporsi kepemilikan manajerial perusahaan adalah relatif rendah (lihat tabel 7).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan akan melakukan praktik manajemen laba sebagai tanggapan atas perubahan tarif pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa perusahaan tidak melakukan praktik manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2009. Hal ini dapat disebabkan karena rentang waktu antara pengumuman perubahan pajak penghasilan terlalu singkat sehingga perusahaan tidak dapat memaksimalkan perencanaan pajak yang dilakukan untuk mendapatkan penghematan pajak. Selain itu, hasil pengujian hipotesis juga menemukan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2010. Hal ini dapat disebabkan karena perubahan tarif pajak penghasilan badan dari tahun 2009 ke tahun 2010 memiliki rentang waktu yang cukup lama sejak diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel kewajiban pajak tangguhan bersih (NDTL), tingkat hutang (DEBT), ukuran perusahaan (SIZE), dan kepemilikan manajerial (MGTOWN) mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh insentif pajak saja yaitu kewajiban pajak tangguhan bersih (NDTL). Hal ini dapat dikarenakan perusahaan menggunakan kewajiban pajak tangguhan bersih untuk memperoleh penghematan pajak. Perusahaan akan meningkatkan kewajiban (aset) pajak tangguhan untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Sedangkan berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa insentif non-pajak seperti tingkat hutang (DEBT), ukuran perusahaan (SIZE), dan kepemilikan manajerial (MGTOWN) tidak mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan tingkat hutang berpengaruh positif terhadap manajemen laba, hipotesis keempat yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan hipotesis kelima yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat hutang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan tidak mampu dengan maksimal memanfaatkan biaya bunga yang timbul dari adanya hutang, pola perilaku dan motivasi yang berbeda di setiap Negara, perusahaan kurang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dalam menghadapi pengaruh politik, dan kepemilikan direksi yang terlalu rendah dari total saham beredar.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa dapat disimpulkan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah: (1) Penelitian ini terbatas pada industri manufaktur untuk menghindari adanya keragaman dari berbagai sektor industri yang tentunya memiliki peraturan-peraturan/perlakuan yang berbeda. Sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada jenis industri lainnya; (2) Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel insentif pajak yaitu kewajiban pajak tangguhan bersih; dan (3) Variabel independen yang dipilih kurang dapat menjelaskan variabel dependen. Hal ini dapat dilihat pada hasil R². Adapun beberapa saran untuk penelitian berikutnya: (1) Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sampel penelitian tidak hanya pada industri manufaktur saja, tetapi juga dapat menambahkan sampel seperti industri jasa atau retail; (2) Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan periode dua tahun dan dua tahun sesudah perubahan tarif pajak penghasilan sehingga dapat diketahui bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan memang benar merupakan respon terhadap perubahan tarif pajak; dan (3) Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan, seperti *tax plan*.

REFERENCES

- Alim. S., 2009, Manajemen Laba dengan Motivasi Pajak pada Badan Usaha Manufaktur di Indonesia, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.13, No.3, September: 444-461.
- Ardilla, T.L., 2012, Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 dan Pengaruh Insentif Pajak-Non Pajak Terhadap Manajemen Laba, *Skripsi Sarjana Strata 1*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Djamaluddin, S., Rahmawati, dan H. T. Wijayanti, 2007, Analisis Perubahan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan untuk Mendeteksi Manajemen Laba, Surabaya: Universitas Sebelas Maret.
- Fitriyani, D., Reka M., dan Muhammad G., 2012, Analisis Perbedaan Earnings Management Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU NO. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, Vol.14, No.1, Januari-Juni: 55-60.
- Ghozali, I., 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guenther, D., 1994, Earnings Management in Response to Corporate Tax Rate Changes: Evidence from the 1986 Tax Reform Act, *The Accounting Review*, Vol.69, No.1, January: 230-243.
- Halim, J., C. Meiden, dan R.L. Tobing, 2005, Pengaruh Manajemen Laba Pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk Dalam Indeks LQ-45, *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, Solo.
- Harahap, S. S., 2007, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayati, S.M., dan Zulaikha, 2003, Analisis Perilaku Earnings Management: Motivasi Minimalisasi Income Tax, *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Irreza, dan Yulianti, 2010, Penggunaan Komponen-Komponen Pembentuk Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba: Sebuah Pendekatan Baru di Indonesia, *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.

- Priyatno, D., 2012, *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Rahmawati, Y. Suparno, dan N. Qomariah, 2006, Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik Yang Terdaftar Di Burs Efek Indonesia, *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Santoso, S., 2010, *Statistika Parametrik*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Scott, W., 2006, *Financial Accounting Theory*, Fourth Edition, Toronto: Pearson Prentice Hall.
- Suandy, E., 2008, *Hukum Pajak*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo dan Octavia, 2010, Manajemen Laba sebagai Respon atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia, *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- Suwardjono, 2010, *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Widyaningdywah, A.U., 2001, Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap *Earnings Management* pada Perusahaan *Go Public* di Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.3, No.2: 89-101.
- Wijaya, M. dan D. Martani, 2011, Praktik Manajemen Laba Perusahaan dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008, *Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Aceh.
- Wiryandari, S.A., dan Yulianti, 2009, Hubungan Perbedaan Laba Akuntansi & Laba Pajak dengan Perilaku Manajemen Laba dan Persistensi Laba, *Simposium Nasional Akuntansi XII*, Palembang.
- Wulandari, D., Kumalahadi, dan J.E. Prasetyo, 2004, Indikasi Manajemen Laba Menjelang Undang-Undang Perpajakan 2000 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta, *Simposium Nasional Akuntansi VII*, Bali.
- Yamashita, H. dan K. Otagawa, 2007, Do Japanese Firms Manage Earnings in Response to Tax Rate Reduction in the Late 1990s?.
- Yulianti, 2005, Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.2, No.1, Juli: 107-129.